



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**“ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI SUMATERA BARAT (1979-2008)”**

OLEH:

NELLA AGUSTRI

06 151 091

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)


Jurusan Ilmu Ekonomi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

PADANG

2011

	No. Alumni Universitas	NELLA AGUSTRI	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a) Tempat/tanggal lahir : Pekan Kamis / 15 Agustus 1988 b) Nama Orang Tua : Erizon dan Deliarti c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 06151091 f) Tanggal Lulus : 07 Januari 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,22 i) Lama Studi : 4 tahun 4 bulan h) Alamat Orang Tua : Jorong III Kampung, Nagari Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat (1979-2008)


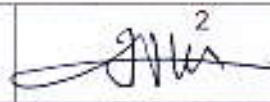
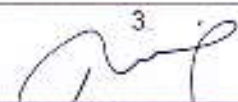
Skripsi S1 oleh: Nella Agustri Pembimbing Skripsi: Drs.Masrizal,M.Soc.Sc

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh PDRB dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat selama periode 1979-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan PAD dan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap PAD Sumatera Barat antara PDRB dan jumlah kendaraan bermotor selama periode 1979-2008. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*), yakni analisis regresi berganda dengan memakai metode selisih logaritma, untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) PAD, PDRB dan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat tahun 1979-2008. Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PDRB dimasa yang akan datang dan melakukan identifikasi/pendataan jumlah kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD di Sumatera Barat.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 07 Januari 2011

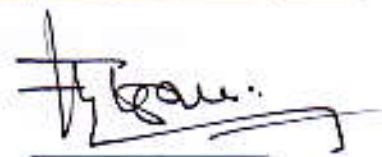
Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc (Pembimbing)	Lukman, SE.M.Si (Pembahas I)	Sosmiarti, SE.M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak terjadinya krisis moneter dan transisi politik, maka tanggal 1 Januari 2001, seluruh daerah di Indonesia mulai menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah", dan UU No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah". UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Menurut asas desentralisasi kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor", sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator. Sedangkan UU No.25 tahun 1999 mengatur pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip "*money follows function*" (Landiyanto, 2005). Berlakunya kedua undang-undang ini akan berdampak pada perubahan paradigma pengelolaan daerah khususnya aspek keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Selanjutnya, ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan

pengaturan dan pembagian sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah terutama kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Berti, 2006).

Secara tidak langsung, otonomi daerah berdampak pada kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah. Darumurti dan Rauta (dalam Berti, 2006) mengemukakan bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas, yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain, bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah pula urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan dalam rangka otonomi daerah antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana daerah.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perkembangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dari tahun 1979-2008 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya.
2. Dari hasil pengujian secara keseluruhan (uji-f), nilai f-hitung adalah 616,41 lebih besar dari f-tabel sebesar 3.35. Artinya semua variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor) secara keseluruhan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)).
3. Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,979 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,90 persen dan sisanya 2,10 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan $\alpha = 0,05$, menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $6,85 > 1,69$, berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa – Bali". Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Sumatera Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 1998.
- Berti, Emelia. 2006. "Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan)*. Kemitraan untuk Tata Pemerintah yang Baik: Jakarta.
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansi Bagi Dunia Ketiga*. Universitas Indonesia (UI: Press).
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI: Press).
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hariato David dan Priyo Hari Adi. " Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita". Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana : Salatiga.
- Ismail, Manawar. 2001. "Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah"; Telaah Ekonomi, Manajemen, Akuntansi (TEMA). Vol II, No.1, ISSN 1411-8149.